

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA, BALI,
DAN KALIMANTAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

AFIFAH AINI BAKNUR

2019/19133002

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

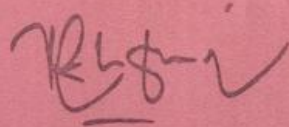
**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA, BALI,
DAN KALIMANTAN**

Nama : Afifah Aini Baknur
NIM : 19133002
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

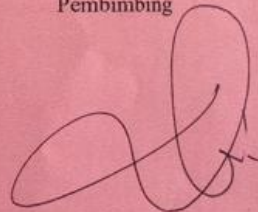
Padang, Juni 2022

Diketahui Oleh,
Koordinator Progam Studi
Diploma III Akuntansi

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE,MM,Ak,CA
NIP. 198008092010121003



Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 196906101998022001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


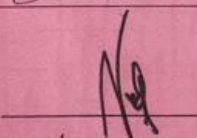
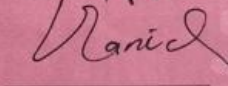
**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA, BALI,
DAN KALIMANTAN**

Nama : Afifah Aini Baknur
NIM : 19133002
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 19 Agustus 2022

Tim Penguji,

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	(Ketua) 
2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Anggota) 
3. Vanica Serly, SE, M.Si	(Anggota) 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Aini Baknur
Thn. Masuk/NIM : 2019/19133002
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Sibusuk, 09 September 2000
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Simpang Tiga Simancung, Nagari
Padang Sibusuk, Kec. Kupitan, Kab. Sijunjung
Judul Tugas Akhir : Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis
Website pada Pemerintah Daerah di, Jawa, Bali, dan
Kalimantan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juni 2022

Yang menyatakan,



Afiyah Aini Baknur
NIM. 19133002

ABSTRAK

Affiah Aini Baknur : (19133002/2019), Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan

Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan pada kabupaten/kota yang terdapat di daerah Jawa, Kalimantan, dan Bali. Data yang dianalisis merupakan data pengelolaan keuangan daerah, yang diperoleh dari pengamatan pada masing-masing *website* pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah diukur dengan melihat tiga kriteria yaitu ketersediaan, dapat diakses, dan ketepatan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks transparansi tertinggi pada pemerintahan daerah yang ada di Jawa diraih oleh Kabupaten Batang dengan rata-rata indeks 62,50%, pada pemerintah yang ada di Bali indeks transparansi tertinggi diraih oleh Kabupaten Bangli dengan rata-rata indeks 20,83%, dan pada pemerintahan yang ada di Kalimantan indeks transparansi tertinggi diraih oleh Kota Singkawang dan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan rata-rata indeks 37,50%. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2020 tingkat transparansi pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa, Bali dan Kalimantan masih tidak cukup transparan (*insufficient*).

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, *Good governance*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan**“. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran di setiap kesulitan yang penulis hadapi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Teristimewa untuk kedua Orang Tua, ayah M. Bakrin dan Ibu Nurna tercinta serta abang saya Ikhsan Nurba Pratama yang selalu mendoakan saya disetiap langkah saya, memberikan semangat, do'a, motivasi, dan dukungan baik berupa moral maupun materil. Saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kalian

adalah hal terbaik di dunia ini yang Allah berikan dan selalu ada dalam keadaan apapun.

3. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
4. Ibuk Deviani SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan masukan-masukan serta arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Liza (Adik) dan Uci (Ucay) sahabat terbaik saya yang telah memberikan semangat membara, bantuan dan selalu mendengarkan keluh kesah saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi tahun 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dalam analisis dan pembahasan. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk keempurnaan

Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, almamater, lembaga dan orang banyak pada umumnya.

Padang, 20 Juni 2022

Afifah Aini Baknur

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Transparansi	8
1. Pengertian Transparansi	8
2. Manfaat Transparansi	11
3. Prinsip-prinsip Transparansi.....	13
4. Indeks Keterbukaan Informasi Berdasarkan <i>Open Budget Survey</i> yang dikeluarkan <i>IBP</i>	15
B. Pengelolaan Keuangan Daerah	16
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	17
3. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
C. Good Governance.....	23
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	23
2. Prinsip Dasar <i>Good Governance</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Bentuk Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Rancangan Penelitian	29

1. Jenis Penelitian	29
2. Tahapan Penelitian	30
3. Objek Penelitian	30
4. Sumber Data Penelitian	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Perusahaan	33
B. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Penelitian.....	65
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skor Transparansi	16
Tabel 3. 1 Jumlah Kabupaten Kota di Jawa, Bali, dan Kalimantan	29
Tabel 3. 2 Dokumen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	30
Tabel 4. 1 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Kabupaten Kota di Jawa.....	49
Tabel 4. 2 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Kabupaten Kota di Bali	54
Tabel 4. 3 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Kabupaten Kota di Kalimantan	56
Tabel 4. 4 Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran pada Kabupaten Kota di Jawa.....	58
Tabel 4. 5 Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran pada Kabupaten Kota di Bali	59
Tabel 4. 6 Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran pada Kabupaten Kota di Kalimantan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Penetapan Ketepatan Waktu Pengungkapan.....	69
Lampiran 2. Rincian Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	70
Lampiran 3. Daftar Website Kota Kabupaten di Jawa.....	71
Lampiran 4. Daftar Website Kabupaten Kota di Bali.....	75
Lampiran 5. Daftar Website Kabupaten Kota di Kalimantan.....	76
Lampiran 6. Peilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kota di Jawa.....	78
Lampiran 7. Penilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kota di Bali.....	138
Lampiran 8. Penilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kota di Kalimantan.....	143
Lampiran 9. Tampilan website yang tidak bisa dibuka.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia banyak mengalami perubahan setelah berakhirnya kekuasaan orde baru tahun 1998. Awalnya sistem pemerintahan bersifat terpusat lalu mengalami desentralisasi. Desentralisasi menyebabkan munculnya otonomi daerah bagi suatu pemerintahan, hal ini berkaitan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berisikan tentang Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Kebijakan itu dikenal dengan otonomi daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika pemerintah di suatu daerah itu dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri, sesuai dengan apa yang diharapkan, dan tidak menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu guna tercapainya *good government governance* atau tata kelola yang baik. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative (Mardiasmo, 2009:18). *Good governance* menerapkan beberapa prinsip yaitu profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima di seluruh masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Lembaga *Transparency International* (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2018. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-89 dari 180 negara dengan skor CPI terbesar 38. Skor CPI berada pada rentang 0-100, 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara itu skor 100 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat bersih. Pemerintah Pusat Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang mengintruksikan kepada

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung dalam aksi pencegahan, pembrantasan korupsi, dan wajib berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, salah satunya yaitu kurangnya transparansi dalam hal laporan keuangan pada suatu lembaga. Korupsi dapat dilakukan karena rendahnya transparansi dalam suatu pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga menyebabkan tata kelola pada suatu pemerintahan itu kurang baik.

Salah satu cara untuk mencapai tata kelola yang baik yaitu dengan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Transparansi keuangan merupakan suatu prinsip dimana setiap orang memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah secara terbuka. Transparansi perlu ditingkatkan karena dibutuhkan dalam fungsi pengawasan, mencegah terjadinya korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya umum. Tranparansi keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan masyarakat berharap pemerintah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola keuangan dan pengeluaran sumber daya daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrument penting dalam mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang pasal 283 Nomor 23 Tahun 2014 yang berisikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan

dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pemerintah wajib untuk mempublikasikan setiap program dan kegiatan yang dilakukan yang dapat diakses dan diperoleh secara mudah oleh masyarakat melalui *website*. *Website* merupakan suatu halaman yang berisikan informasi yang bisa diakses oleh orang yang ada diseluruh dunia dengan menggunakan jaringan internet. Penggunaan *website* memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Terdapat berbagai penelitian yang menyatakan hubungan antara transparansi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan suatu keharusan dalam melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah akan berusaha sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Penelitian Irwan, dkk (2016) mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berbasis *website* menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah yaitu sebesar 16,84

%. Kemudian, penelitian Annisa (2017) menemukan tingkat transparansi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa sebesar 26,21% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 19,59% di tahun 2016. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Welly dan Syahrul (2021) menunjukkan bahwa analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah se-Jawa Bali tidak cukup (*Insufficient*) yakni 28,37%. Begitupula, penelitian Prihatin dan Ritonga (2017) menyatakan bahwa rata-rata indeks transparansi pengelolaan pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah 12,67% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 9,42% di tahun 2016. Hasil dari pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan masih dalam kategori tidak cukup (*insufficient*). Sederhananya, temuan penelitian tersebut menginformasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pada daerah Jawa, Bali dan Kalimantan masih rendah, dapat dikatakan pengelolaan keuangan pemerintah pada daerah tersebut dilaksanakan secara tidak transparan. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan kembali analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah di Jawa, Bali dan Kalimantan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah di Jawa, Bali dan Kalimantan apakah memiliki kemajuan atau tidak. Sehingga peneliti mengambil

judul “**Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintahan Daerah di Jawa, Bali dan, Kalimantan** “.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan media belajar untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran disiplin ilmu yang diperoleh dan dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang ada tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis *website* pada daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi pendukung tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis *website* di daerah Jawa, Bali, dan Kalimantan.

3. Bagi Akademik

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik itu bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang analisis pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Jawa, Bali dan Kalimantan masih sangat rendah yaitu sebesar 18,10% pada Jawa, 5.09% pada Bali dan 5,95% pada Kalimantan. Setelah dikategorikan hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah Jawa, Bali, dan Kalimantan berada dalam kategori tidak cukup transparan (*insuffucient*) yang artinya pemerintah kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Kalimantan masih belum terbuka terhadap informasi pengelolaan keuangan daerahnya yang mana seharusnya dipublikasikan pada *website* masing-masing pemda.
2. Terdapat 12 indikator sebagai penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang paling banyak di publikasikan pada setiap *website* pemda kota/kabupaten di Jawa, Bali, Dan Kalimantan adalah informasi mengenai Peraturan Daerah tentang APBD.
3. Pada *website* kabupaten/kota yang terdapat di daerah Jawa, Kalimantan, dan Bali ini masih banyak sekali pemerintah daerahnya tidak mempublikasikan

dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga memiliki skor transparansi 0%.

B. Keterbatasan Penelitian

Kendala yang dialami penulis dalam penelitian ini yaitu dalam mengukur ketepatan waktu publikasi karena tidak semua kota/kabupaten yang mencantumkan tanggal publikasi ataupun tanggal penetapan pada sebuah dokumen pengelolaan keuangan daerah di masing-masing *website* kabupaten/kota. Selain itu, pada saat membuka website pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat juga beberapa *link* yang tidak bisa dibuka, sehingga penulis tidak dapat melihat dokumen pengelolaan keuangan yang ada pada *website* tersebut.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota yang ada di daerah Jawa, Bali, dan Kalimantan sebagai berikut :

1. Semua pemerintah daerah yang ada, hendaknya mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat bisa melihat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang telah mempublikasikan dokumen transparansi pengelolaan keuangan daerah, hendaknya mencantumkan tanggal *upload* dan tanggal penetapan dokumen tersebut.

3. Pemerintah daerah yang memiliki indeks transparansi yang rendah, agar dapat menyediakan informasi pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A. (2017). *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah se-Jawa*, 5(4), 1-19.
- Adrianto , N. (2007). *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* . Malang: Bayumedia Publishing .
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim , A. (2007). *Akunatnsi Keungan Daerah* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat .
- Halim, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN .
- International Budget Partnership (IPB). 2015. *Open Budgets Transform Live*.
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. (n.d.).
- Kariangan , H. (2017). *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Cimanggis Kencana .
- Krina P , L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi* . Jakarta.
- Kurniawan , F. (2020, Juni 4). *Transparansi ? Pentinglah*. Retrieved from <https://www.klinikakuntansi.net/2020/06/transparansi-pentinglah.html>
- Mardiasmo . (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1-17.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance* (Vol. 2).
- Medina, F. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah* . Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nasere, V. C., Tinangon, J. J., & Warongan , J. D. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara. *EMBA*, 4(4), 1229-1237.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Ananlisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Empiris pada Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal TECHNOBIZ*, 3(5), 25-30.